



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 120 TAHUN 2013
TENTANG
JADUAL RETENSI ARSIP FASILITATIF DAN SUBSTANTIF
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan dinamisasi sistem kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif di Lingkungan Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Departemen Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian;
10. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor P.JRA/26/2011 tanggal 8 agustus 2011 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Kementerian Agama;
11. Surat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 62/s/II-X.6/09/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Keuangan Kementerian Agama;
12. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/V.224-7/15 tanggal 29 Juli 2010 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG JADUAL RETENSI ARSIP FASILITATIF DAN SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA.**

KESATU : Menetapkan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif di Lingkungan Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Jadwal Retensi Arsip Keuangan;
 - b. Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian; dan
 - c. Jadwal Retensi Arsip Non Keuangan dan Kepegawaian.
- KETIGA : Jadwal Retensi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Jadwal Retensi Arsip yang memuat kegiatan Kementerian Agama yang bersifat operasional.
- KEEMPAT : Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pejabat/pengelola arsip dalam menetapkan suatu jenis arsip dan/atau jangka waktu arsip dapat dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 111 Tahun 1999 tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 681 Tahun 1997 tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Departemen Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2013

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized loops and a long horizontal stroke at the end, positioned over a horizontal line.

SURYADHARMA ALI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 120 TAHUN 2013
TENTANG
JADUAL RETENSI ARSIP FASILITATIF DAN SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

JADUAL RETENSI ARSIP

A. BIDANG FASILITATIF

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
1	PERENCANAAN			
	a Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan	Selama Berlaku	3 tahun	Permanen
	1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang/ <i>master plan</i> (RPJP)			
	2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)/Renstra			
	b Program Kerja Tahunan			
	1) Usulan Program Kerja Satuan Organisasi/Kerja	1 tahun	2 tahun	Musnah, kecuali draft akhir masuk ke program kerja tahunan
	2) Program Kerja Tahunan Satuan Organisasi/Kerja	2 tahun	3 tahun	Permanen
	3) Program Kerja Tahunan Kementerian	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c Penetapan/Kontrak Kinerja	3 tahun	4 tahun	Permanen
	1) Pimpinan Satuan Organisasi/Kerja			
	2) Menteri			
	d Laporan			
	1) Laporan berkala			
	a) Laporan bulanan	1 tahun	2 tahun	Musnah, setelah menjadi laporan triwulan
	b) Laporan triwulan	1 tahun	2 tahun	Musnah, setelah menjadi laporan semester
	c) Laporan semesteran	1 tahun	2 tahun	Musnah, setelah menjadi laporan tahunan
	d) Laporan tahunan satuan Organisasi/Kerja	2 tahun	3 tahun	Permanen
	e) Laporan tahunan Kementerian	2 tahun	4 tahun	Permanen
	2) Lapioran Akuntabilitas Kerja (LAKIP)	1 tahun	2 tahun	Permanen
	3) Laporan insidental	2 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
	e Evaluasi Program			
	1) Evaluasi Program Satuan Organisasi/Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah setelah masuk program Kementerian
	2) Evaluasi Program Kementerian	2 tahun	4 tahun	Permanen
	f Data Perencanaan Kementerian			
	1) Data perencanaan Satuan organisasi/kerja	2 tahun setelah laporan	4 tahun	Dinilai kembali
	2) Data perencanaan Kementerian	2 tahun setelah laporan	4 tahun	Permanen

2. HUKUM ...

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
2	HUKUM a Peraturan/Keputusan Menteri Agama Termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum b Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Berkas tentang pemberian bantuan/konsultasi hukum (pidana, perdata, TUN dan agama) c Fatwa 1) Akta Waris 2) Akta Hibah 3) Akta Ikrar Wakaf 4) Bedah Mayat d Program Legislasi : 1) bahan/materi program legislasi nasional dan instansi pusat 2) program legislasi instansi pusat/daerah e Rancangan Peraturan Perundang-undangan 1) Rancangan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum 2) Rancangan Peraturan Pemerintah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum 3) Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum f Instruksi/Surat Edaran : 1) Instruksi/Surat Edaran Menteri 2) Instruksi/Surat Edaran pejabat setingkat eselon I dan II Termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum g Surat Perintah 1) Surat perintah Menteri 2) Surat Perintah Eselon I dan II h Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang Bersifat Nasional/Regional/Instansional Termasuk Rancangan Awal Sampai Dengan Rancangan Akhir i Nota Kesepahaman/Memorandum Of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerjasama: 1) Dalam Negeri 2) Luar Negeri j Dokumentasi Hukum Undang - Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan - Peraturan yang Dijadikan Referensi k Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum 1) Berkas yang Berhubungan dengan Kegiatan Sosialisasi atau Penyuluhan Hukum 2) Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penyuluhan Hukum l Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Berkas tentang Pemberian Bantuan/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama) m Kasus/Sengketa Hukum 1) Pidana berkas tentang Kasus/Sengketa Pidana, Baik Kejahatan maupun Pelanggaran:	1 tahun setelah diperbaharui 2 tahun Selama berlaku 1 tahun 2 tahun 1 tahun setelah diundangkan 1 tahun setelah diperbaharui 1 tahun setelah diperbaharui 1 tahun setelah pelaksanaan 1 tahun setelah pelaksanan 1 tahun setelah diperbaharui 1 tahun setelah perjanjian berakhir sampai dengan tidak berlaku 2 tahun setelah pelaksanaan 2 tahun 1 tahun setelah diperoleh keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi	5 tahun 2 tahun - 2 tahun 3 tahun 3 tahun 2 tahun 2 tahun 5 tahun 5 tahun - 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Dinilai Kembali Permanen Musnah, kecuali draft asli masuk program legislasi Permanen permanen Permanen dinilai kembali Permanen Dinilai Kembali Permanen Permanen Musnah Musnah Dinilai Kembali Dinilai Kembali

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	- Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis - Berkas Pembelaan dan Bantuan Hukum - Telaah Hukum dan Opini Hukum 2) Perdata Berkas tentang Kasus/Sengketa Perdata: - Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis - Berkas Pembelaan dan Bantuan Hukum - Telaah Hukum dan Opini Hukum 3) Tata Usaha Negara Berkas tentang Kasus/Sengketa Tata Usaha Negara: - Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis - Berkas Pembelaan dan Bantuan Hukum - Telaah Hukum dan Opini Hukum 4) Arbitrase Berkas tentang Kasus/Sengketa Arbitrase: - Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis - Berkas Pembelaan dan Bantuan Hukum - Telaah Hukum dan Opini Hukum n Perizinan Berkas Perizinan Sejak Permohonan Sampai Dengan Diter bitkannya Surat Izin	hak dan kewajiban		
		1 tahun setelah diperoleh keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban	3 tahun	Permanen
		sampai dengan izin diperbaharui	2 tahun	Dinilai Kembali
3	ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN			
	a Struktur Organisasi Kementerian Agama RI 1) Pembentukan 2) Pengubahan 3) Pembubaran	Selama berlaku	5 tahun	Permanen
	b Dokumen Reformasi Birokrasi	1 tahun	5 tahun	Permanen
	c Uraian Tugas dan Tata Kerja	Selama Berlaku	5 tahun	Permanen
	d Pembinaan dan Evaluasi Organisasi	1 tahun	5 tahun	Dinilai Kembali
	e Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional	Selama Berlaku	5 tahun	Permanen
	f Analisa Beban Kerja	1 tahun	3 tahun	Permanen
	g Penilaian dan Pembinaan Kinerja Unit Pelayanan Masyarakat	1 tahun	2 tahun	Dinilai Kembali

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
6	HUBUNGAN MASYARAKAT a Naskah Pidato Menteri Agama/Pejabat Unit Eselon I 1) Menteri 2) Pejabat Eselon I dan II b Rapat Kerja /Dengar Pendapat (<i>hearing</i>) dengan Anggota DPR c Publikasi Melalui Media Cetak maupun Elektronik d Penerbitan Majalah, Buletin, Koran dan Jurnal e Volunteer /Tenaga Sukarela f Dokumentasi/Liputan Kegiatan Dinas Pimpinan, Acara Kedinasan dan Peristiwa - Peristiwa Bidang Masing Masing, dalam Berbagai Media:Kertas/Foto/Video/Rekaman Suara/Multimedia g Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Informasi Kelembagaan: 1) Kliping Koran 2) Brosur/Leaflet/Poster/Plakat 3) Pengumuman/Pemberitaan 4) Daftar Nama/Alamat Kantor/Pejabat h Hubungan Antar Lembaga: 1) Hubungan Antar Lembaga Pemerintah 2) Hubungan dengan Organisasi Sosial/LSM 3) Hubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah 4) Forum Kehumasan (Bakohumas/Perhumas) 5) Hubungan dengan Media Massa: a) Siaran Pers/Konferensi Pers/ <i>Press Release</i> b) Kunjungan Wartawan/Peliputan c) Wawancara i Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf j Pameran/Sayembara/Lomba, Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan k Penghargaan/Tanda Kenang - Kenangan Administrasi Pemberian Penghargaan/Tanda Kenang - Kenangan kepada Masyarakat yang Memiliki Jasa Prestasi Besar terhadap negara l Keprotokolan 1) Penyelenggaraan Acara Kedinasan (Upacara, Pelantikan, Peresmian,dan Jamuan Termasuk Acara Peringatan Hari - Hari Besar) 2) Buku Tamu 3) Agenda Kegiatan Pimpinan Instansi (Pejabat Negara, Eselon I/II/Pejabat Setingkat) 4) Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri a) Kunjungan Dinas Pimpinan Organisasi/Instansi (Pejabat Negara dan Eselon I) b) Kunjungan Dinas Pejabat Lain/Pegawai	2 tahun 2 tahun 1 tahun 1 tahun 2 tahun 2 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Sampai Dengan Diperbaharui 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 2 tahun 1 tahun 2 tahun 1 tahun 2 tahun 1 tahun	3 tahun 3 tahun 4 tahun 3 tahun 3 tahun 5 tahun 4 tahun 2 tahun 2 tahun 1 tahun 4 tahun 4 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 4 tahun 3 tahun 3 tahun 2 tahun 5 tahun 3 tahun -	Permanen Dinilai Kembali Permanen Musnah, kecuali master permanen Musnah, Kecuali Master Permanen Musnah Musnah, kecuali master dinilai kembali Musnah, kecuali yang berkaitan dengan kasus atau peristiwa yang lain Musnah, kecuali master dinilai kembali dinilai kembali Musnah, kecuali master permanen Dinilai Kembali Dinilai Kembali Musnah Musnah Dinilai Kembali Musnah Musnah Musnah Dinilai Kembali Permanen Musnah Musnah, kecuali pejabat negara atau tokoh nasional, Permanen Musnah Musnah, kecuali pejabat negara, permanen dinilai kembali

7. PENELITIAN ...

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
8	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI			
	a Pedoman-pedoman kediklatan	2 tahun setelah perubahan	10 tahun	Permanen
	b Kurikulum - kurikulum diklat	1 tahun setelah menjadi pedoman	4 tahun	Dinilai kembali
	c Modul-modul diklat	2 tahun setelah diperbarui	5 tahun	Permanen
	d Panduan fasilitator	2 tahun setelah diperbarui	5 tahun	Permanen
	e Saran/Rekomendasi penyelenggaraan Diklat	1 tahun	2 tahun	Musnah
	f Notulen Sosialisasi/Rapat koordinasi kebijakan Diklat	1 tahun	2 tahun	Musnah
	g Akreditasi Lembaga Diklat			
	1) Surat Permohonan akreditasi			
	2) Laporan hasil verifikasi lapangan			
	3) Berita acara rapat verifikasi			
	4) Berita acara rapat Tim Penilai			
	5) Surat Keputusan Penetapan Akreditasi			
	6) Sertifikat Akreditasi			
	7) Laporan Akreditasi Lembaga Diklat			
	h Sertifikasi sumber daya manusia kediklatan			
	1) Surat permohonan sertifikasi	selama berlaku	10 tahun	permanen
	2) Laporan hasil verifikasi lapangan			
	3) Berita acara rapat verifikasi			
	4) Berita acara rapat Tim Penilai			
	5) Surat Keputusan Penetapan Sertifikasi			
	6) Sertifikat Sertifikasi			
	7) Laporan sertifikasi individual			
	i Sistem Informasi diklat			
	1) Data lembaga diklat	1 tahun setelah diperbarui	5 tahun	Musnah
	2) Data prasarana Diklat			
	3) Data sarana Diklat			
	4) Data pengelola diklat			
	5) Data penyelenggara Diklat			
	6) Data Widyaiswara			
	7) Data program Diklat			
	j Registrasi sertifikat/STTPL peserta Diklat	15 tahun	10 tahun	Permanen
	1) Surat permohonan kode registrasi			
	2) Buku registrasi			
	3) Surat penyampaian kode registrasi			
	k Rencana tahunan diklat	2 tahun	3 tahun	Musnah
	l Rencana penyelenggaraan Diklat	1 tahun	1 tahun	Musnah
	m Penyelenggaraan Diklat	1 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali sertifikat/STTPL Permanen
	1) Surat pemanggilan peserta			
	2) Surat Keputusan Tim Penyelenggara Diklat			
	3) Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat			
	4) Panduan Diklat			
	5) Laporan panitia penyelenggara Diklat			
	6) Sambutan pembukaan penyelenggaraan Diklat			
	7) Daftar peserta Diklat			
	8) Bahan ajar Diklat			
	9) Daftar hadir peserta Diklat			
	10) Daftar hadir widyaiswara			
	11) Formulir Evaluasi Diklat			
	12) Formulir Evaluasi Widyaiswara			
	13) Hasil Formulasi Evaluasi peserta Diklat			
	14) Sertifikat/STTPL			
	15) Sambutan penutupan Diklat			
	n Laporan penyelenggaraan Diklat	2 tahun setelah penyelenggaraan	3 tahun	Dinilai kembali
	o Evaluasi penyelenggaraan Diklat	2 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
	p Evaluasi alumni pasca Diklat	2 tahun	2 tahun	Dinilai Kembali

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
9	KEPUSTAKAAN a Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka 1) Bukti Penerimaan Koleksi Bahan Pustaka Deposit 2) Administrasi Pengolahan Deposit Bahan Pustaka b Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka 1) Buku Induk Koleksi 2) Daftar Buku Terseleksi 3) Daftar Buku dalam Pemesanan 4) Daftar Buku dalam Permintaan 5) Daftar Penerimaan Bahan Pustaka Hasil Pembelian, Hadiah Deposit,Hibah 6) Daftar Pengiriman Bahan Pustaka Surplus 7) Lembar Kerja Pengolahan BP (Buram, Pengkatalogan) 8) Shelt List/Jajaran Kartu Utama (Master List) 9) Daftar Tambahan Buku (Assesion List) 10) Daftar/Jajaran Kendali (Subyek dan Pengarang) c Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi 1) Data dan Statistik Anggota, Pengunjung dan Peminjaman Bahan Pustaka 2) Pertanyaan Rujukan dan Jawaban d Preservasi Bahan Pustaka 1) Survei Kondisi Bahan Pustaka 2) Reprografi Bahan Pustaka e Pembinaan Perpustakaan 1) Bimbingan Teknis 2) Penyuluhan 3) Sosialisasi	2 tahun setelah buku diterima 2 tahun setelah pelaksanaan sampai tidak dipergunakan 2 tahun 1 tahun setelah buku diterima 1 tahun setelah buku diterima 1 tahun setelah buku diterima 1 tahun setelah buku diterima 1 tahun setelah buku dibuat katalog 1 tahun setelah BP tidak dikoleksi 2 tahun setelah terbit 1 tahun setelah tajuk diperbaharui 2 tahun setelah diterbitkan 2 tahun 1 tahun setelah dilaksanakan 2 tahun setelah dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 5 tahun 3 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 3 tahun 2 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah, kecuali pejabat negara atau tokoh nasional permanen Musnah Musnah Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
12	KEUANGAN a Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 1) Penyusunan RAPBN a Arah Kebijakan Umum, Strategi,Prioritas dan Renstra - Rencana Kerja - Rencana Kerja Pemerintah b Rencana Anggaran Kerja Instansi Pemerintah (RAKIP) dan RKA-K/L (Termasuk Usulan Anggaran Belanja dari/di Unit Organisasi) c Rancangan Anggaran Satuan Kerja Instansi Pemerintah (RASKIP) 2) Penyampaian RAPBN Kepada DPR-RI a Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Undang - Undang RAPBN - Nota Keuangan Kementerian - Materi RAPBN dari Lembaga Negara dan Badan Pemerintah (LNBP) b Pembahasan RAPBN oleh Komisi DPR-RI c Risalah Rapat Dengar Pendapat dengan DPR - RI d Nota Jawaban DPR - RI 3) Undang - Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) b Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 1) Ketetapan Pagu Indikatif 2) Ketetapan Pagu Sementara 3) Ketetapan Pagu Definitif 4) Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian 4) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Revisinya 6) Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran 7) Target Penerimaan Negara Bukan Pajak c Pelaksanaan Anggaran 1) Pendapatan a) Surat Setoran Pajak (SSP) b) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) c) Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) d) Penerimaan Sisa Anggaran Lebih dan Saldo Kas atau Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) e) Bunga dan atau Jasa Giro Bank f) Pengelolaan Barang Milik Negara 2) Belanja a) Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Antara Lain Untuk: - Barang Habis Pakai - Barang Inventaris - Jasa Beserta Data Pendukungnya, Antara Lain: - Dokumen Uang Muka dan Data Pendukung - Penagihan/Invoice, Kuitansi Pembayaran, Faktur Pajak, Bukti	 Selama masih berlaku 1 tahun 1 tahun 1 tahun setelah tahun anggaran berakhir 1 tahun setelah tahun anggaran berakhir 1 tahun setelah tahun anggaran berakhir 1 tahun setelah tahun anggaran berakhir 1 tahun setelah tahun anggaran berakhir 1 tahun setelah tahun anggaran berakhir 1 tahun setelah tahun anggaran berakhir 1 tahun setelah tahun anggaran berakhir 1 tahun setelah tahun anggaran berakhir 1 tahun setelah tahun anggaran berakhir 1 tahun setelah UU LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) diundangkan 1 tahun setelah UU LKPP diundangkan 1 tahun setelah UU LKPP diundangkan 1 tahun setelah UU LKPP diundangkan 1 tahun setelah UU LKPP diundangkan 1 tahun setelah UU LKPP diundangkan 1 tahun setelah UU LKPP diundangkan 1 tahun setelah serah terima barang 1 tahun setelah serah terima barang 1 tahun setelah serah terima pekerjaan	 4 tahun 3 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 3 tahun 3 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 9 tahun 9 tahun 9 tahun 9 tahun 9 tahun 9 tahun 4 tahun 5 tahun 5 tahun setelah hak dan kewajibannya habis	 Permanen Musnah Musnah Permanen Musnah Permanen Permanen Permanen Musnah Musnah Permanen Dinilai Kembali Dinilai Kembali Permanen Dinilai Kembali Dinilai Kembali Dinilai Kembali Musnah Musnah Dinilai Kembali Musnah Dinilai Kembali Dinilai Kembali

Membayar ...

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Beserta Lampirannya b) Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) c) Pembukuan Anggaran yaitu: - Buku Kas Umum (BKU) - Buku Kas Pembantu (BKP) - Buku/Kartu Pengawasan Kredit Anggaran - Rekening Koran Bank d Daftar Gaji e Kartu Gaji f Penggunaan Dana Pemerintah RI untuk Kontribusi/Iuran pada Badan atau Organisasi Internasional g Dokumen Penyertaan Modal Pemerintah h Hutang Negara i Laporan Arus Kas - Berita Acara Pemeriksaan - Kas/Register Penutupan Kas - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Termasuk Arsip Data Komputer (ADK) - Laporan Pendapatan Negara - Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) Bulanan/Triwulan/Semesteran j Laporan Keuangan Tahunan Terdiri Dari: - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Neraca - Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)	1 tahun setelah UU LKPP diundangkan 1 tahun setelah UU LKPP diundangkan 1 tahun setelah tahun anggaran berakhir 1 tahun setelah SKPP 1 tahun setelah tahun anggaran berakhir 1 tahun setelah investasi berakhir 1 tahun setelah UU LKPP diundangkan 1 tahun setelah tahun anggaran berakhir 1 tahun setelah UU LKPP diundangkan	5 tahun 9 tahun 5 tahun 1 tahun setelah ahli waris selesai 9 tahun 9 tahun 9 tahun 9 tahun 9 tahun 5 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 9 tahun 9 tahun 9 tahun 9 tahun 9 tahun 2 tahun	Musnah Dinilai Kembali Musnah Dinilai Kembali Permanen Dinilai Kembali Dinilai Kembali Musnah Permanen Permanen Permanen Dinilai Kembali Dinilai Kembali Dinilai Kembali Dinilai Kembali Dinilai Kembali Musnah
	d Bantuan/Pinjaman Luar Negeri 1) Permohonan Pinjaman Luar Negeri (Blue Book) 2) Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Grey Book) 3) Dokumen Memorandum Of Understanding (MOU) dan Dokumen Sejenisnya 4) Dokumen Loan Agreement Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Seperti:Draft agreement, legal opinion, Surat Menyurat dengan lender 5) Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri,Antara Lain : Usulan Luncuran Dana 6) Aplikasi Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri berikut Lampirannya: - Reimbursement - Direct Payment/Transfer Of Procedure - Special Commitment/ L/C Opening - Special Account/ Imprest Fund 7) Otorisasi Penarikan Dana(Payment Advice) 8) Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri Yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SPM Beserta Lampirannya, antara lain: SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya 9) Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) Meliputi Antara Lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation,Notification of Contract, Withdrawal Authorization(WA), Statement of Expenditure(SE) 10) Staff Appraisal Report	1 tahun setelah diterbitkan 1 tahun setelah loan agreement ditandatangani 1 tahun setelah tahun anggaran berakhir 1 tahun setelah proyek diserahkan 1 tahun setelah pekerjaan diserahkan 1 tahun setelah pekerjaan diserahkan 1 tahun setelah pekerjaan diserahkan 1 tahun setelah pekerjaan diserahkan 1 tahun setelah Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) selesai	3 tahun 3 tahun 3 tahun 9 tahun 9 tahun 9 tahun 9 tahun 9 tahun 9 tahun 9 tahun 9 tahun 9 tahun 9 tahun 9 tahun 2 tahun	Permanen Permanen Permanen Dinilai Kembali Dinilai Kembali Dinilai Kembali Dinilai Kembali Dinilai Kembali Dinilai Kembali Dinilai Kembali Dinilai Kembali Dinilai Kembali Dinilai Kembali Dinilai Kembali Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	11) Report/Laporan yang Terdiri Dari: - Progress Report - Monthly Report - Quarterly Report	1 tahun setelah pekerjaan diserahterimakan	9 tahun	Dinilai Kembali
	12) Laporan Hutang Negara: - Laporan Pembayaran Hutang Negara - Laporan Posisi Hutang Negara	1 tahun setelah terbit	3 tahun	Permanen
	13) Completion report/annual report	1 tahun setelah UU LKPP diundangkan	5 tahun	Permanen
	14) Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Bantuan/Pinjaman Luar Negeri	1 tahun setelah diperbaharui	4 tahun	Permanen
	e Pengelola APBN/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) 1) Keputusan Menteri tentang Penetapan: - Kuasa Pengguna Anggaran - Kuasa Pengguna Barang/Jasa - Pejabat Pembuat Komitmen - Pejabat Pembuat Daftar Gaji - Pejabat Penandatangan SPM - Bendahara Penerimaan/Pengeluaran - Pengelola Barang <i>(termasuk berita acara serah terima jabatan)</i>	1 tahun setelah masa jabatan berakhir	4 tahun	Dinilai Kembali
	f Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 1) Manual Implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	1 tahun setelah ketentuan/peraturan diperbaharui	2 tahun	Permanen
	2) Berita Acara Rekonsiliasi	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	5 tahun	Musnah
	3) Daftar Transaksi (DT), Pengeluaran (PK), Penerimaan (PN), Dokumen Sumber (DS), Bukti Jurnal (BJ), Surat Tanda Setor (STS), Surat Setor Bukan Pajak (SSBP), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SPM dalam Daftar Ringkasan Pengembalian dan Potongan dari Pengeluaran (SPDR)	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	5 tahun	Musnah
	4) Listing (Daftar Rekaman Penerimaan) Buku Temuan dan Tindakan Lain (SAI)	2 tahun setelah UU LKPP diundangkan	2 tahun	Musnah
	5) Laporan Realisasi Bulanan SAI	1 tahun setelah UU LKPP diundangkan	2 tahun	Musnah
	6) Laporan realisasi triwulan SAI (Sistem Akuntansi Instansi) dari Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Wilayah (UAPAW) dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Pusat	1 tahun setelah UU LKPP diundangkan	2 tahun	Musnah
	g Pertanggungjawaban Keuangan Negara 1) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)	2 tahun setelah ditindaklanjuti	5 tahun	Dinilai Kembali
	2) Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal	2 tahun setelah ditindaklanjuti	8 tahun	Dinilai Kembali
	3) Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional a) LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) b) MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan) c) Tindak Lanjut/Tanggapan LHP	2 tahun setelah ditindaklanjuti	5 tahun	Dinilai Kembali
	4) Dokumen Penyelesaian Keuangan Negara a) Tuntutan Perbendaharaan b) Tuntutan Ganti Rugi	5 tahun setelah kasus mendapat keputusan hukum yang tetap	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
13	KEPEGAWAIAN a Formasi Pegawai 1) Usulan dari Unit Kerja 2) usulan Permintaan Formasi kepada Menpan dan & RB dan Ka BKN 3) Persetujuan Menpan dan Reformasi Birokrasi 4) Penetapan Formasi 5) Penetapan Formasi Khusus b Pengadaan Pegawai 1) Proses Penerimaan Pegawai, Meliputi: - Pengumuman - Seleksi Administrasi - Pemanggilan Peserta Test - Pelaksanaan Ujian Tertulis - Keputusan Hasil Ujian - Wawancara 2) Penetapan Pengumuman Kelulusan 3) Berkas Lamaran yang Tidak Diterima 4) Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP 5) Nota Usul Pengangkatan CPNS Menjadi PNS Lebih 2 Tahun 6) SK CPNS/PNS Kolektif c Pembinaan Karir Pegawai 1) Diklat/Kursus/Tugas Belajar/Ujian Dinas/Izin Belajar Pegawai - Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat Izin - Laporan Kegiatan Pengembangan Diri 2) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat 3) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 4) Daftar Usul Penetapan Angka Kredit 5) Disiplin Pegawai - Daftar Hadir - Rekapitulasi Daftar Hadir 6) <u>Berkas Hukuman Disiplin</u> 7) Penghargaan dan Tanda Jasa d Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai e Mutasi Pegawai 1) Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Mutasi antar Unit 2) Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN 3) Mutasi Keluarga - Surat Izin Pernikakan/Perceraian - Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian - Akta Nikah/Cerai - Akta Kelahiran Anak - Surat Keterangan Meninggal Dunia 4) Usul Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan	2 tahun setelah tahun anggaran 2 tahun setelah tahun anggaran 2 tahun setelah tahun anggaran 2 tahun setelah tahun anggaran 2 tahun setelah realisasi 2 tahun setelah semua diangkat 2 tahun setelah semua diangkat PNS 1 tahun setelah tahun anggaran - 1 tahun setelah SK ditetapkan 2 tahun setelah petikan SK ditetapkan 1 tahun setelah SK ditetapkan - 1 tahun setelah SK ditetapkan 1 tahun anggaran berjalan 1 tahun anggaran berjalan 1 tahun anggaran berjalan 2 tahun setelah SK ditetapkan 1 tahun setelah memperoleh keputusan tetap 1 tahun setelah SK ditetapkan - - 1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 2 tahun - - 2 tahun 3 tahun 2 tahun - - 3 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 5 tahun 2 tahun - - 2 tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah Masok Berkas perseorangan Masok Berkas perseorangan Dinilai Kembali Musnah Masok Berkas perseorangan Musnah Musnah, Kecuali SK PAK Masok Berkas perseorangan Musnah <u>Musnah, Kecuali BAP dan SK Masok Berkas perseorangan</u> Musnah, Kecuali SK Masok Berkas perseorangan Dinilai Kembali, Kecuali SK Penetapan masuk Berkas perseorangan Musnah, Kecuali Nota dan SK Masok Berkas perseorangan Masok Berkas perseorangan Masok Berkas perseorangan Musnah, Kecuali Nota dan SK Masok Berkas perseorangan

5) Usul ...

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	5) Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural /Fungsional	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, Kecuali SK Masuk Berkas perseorangan
	6) Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, Kecuali Surat Persetujuan & SK Masuk Berkas perseorangan
	7) Peninjauan Masa Kerja	2 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali Nota& SK Masuk Berkas perseorangan
	8) Berkas Baperjakat	1 tahun setelah SK ditetapkan	5 tahun	Musnah
	f Administrasi Pegawai			
	1) Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	2 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah, Kecuali SK Masuk Berkas perseorangan
	2) Cuti Besar	1 tahun setelah SK ditetapkan	-	Masuk Berkas perseorangan
	3) Cuti Sakit,Cuti Bersalin, Cuti Tahunan	1 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah
	4) Cuti Alasan Penting	1 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah
	5) Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)	3 tahun setelah pelaksanaan	-	Masuk Berkas perseorangan
	6) Dokumentasi Indentitas Pegawai - Usul Penetapan Karpeg/ KPE/ Karis/ Karsu - Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan - Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) - Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	1 tahun setelah identitas ditetapkan	2 tahun	Musnah
	7) Berkas Kepegawaian & Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	2 tahun	-	Musnah
	g Kesejahteraan Pegawai			
	1) Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	2 Tahun	-	Musnah
	2) Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai			
	3) Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan			
	4) Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial			
	5) Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi			
	6) Berkas tentang Layanan Beras/ Pakaian Dinas			
	7) Berkas tentang Layanan Pengurusan Jenazah			
	h Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Masuk Berkas perseorangan
	i Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	1 tahun setelah keputusan bersifat tetap	2 tahun setelah hak kewajibannya habis	Dinilai Kembali
	j Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Janda /Dudanya dan PNS yang Tewas	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, Kecuali SK Masuk Berkas perseorangan
	k Berkas perseorangan Pegawai Negeri Sipil	1 tahun setelah berhenti/ pensiun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Lain yang Secara Individual Ditentukan oleh Instansi dan PNS yang Berjasa/ Terlibat Peristiwa Berskala Nasional
	1) Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya			
	2) Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN			
	3) SK Pengangkatan CPNS			
	4) Hasil Pengujian Kesehatan			
	5) SK Pengangkatan PNS			
	6) SK Peninjauan Masa Kerja			
	7) SK Kenaikan Pangkat			
	8) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/ Menduduki Jabatan/ Surat Pernyataan Pelantikan			
	9) SK Pengangkatan dalam atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/ Fungsional			
	10) SK Perpindahan Wilayah Kerja			
	11) SK Perpindahan antar Instansi			
	12) SK Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)			
	13) Berita Acara Pemeriksaan			
	14) SK Hukuman Jabatan/ Hukuman Disiplin PNS			
	15) SK Perbantuan/ Dipekerjakan Diluar Instansi Induk			
	16) SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/ Dipekerjakan			
	17) SK Pemberian Uang Tunggu			
	18) SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena Diangkat Sebagai Pejabat Negara			

19) SK Pengalihan ...

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	19) SK Pengalihan PNS 20) SK Pemberhentian sebagai PNS 21) SK Pemberhentian Sementara 22) Surat Keterangan Pernyataan hilang 23) Surat Keterangan Kembalinya PNS yang Dinyatakan Hilang 24) SK Pergantian Nama 25) Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran 26) Akta Nikah/Cerai 27) Akta Kelahiran 28) Isian Formulir PUPNS 29) Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan 30) Surat Permohonan Menjadi Anggota Partai Politik 31) Surat Keterangan Mutasi Keluarga 32) Surat Keterangan Meninggal Dunia 33) Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan 34) Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional 35) Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus 36) Surat pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala 37) Surat Tugas/Izin Belajar Dalam/Luar Negeri 38) Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri 39) SK Penempatan/Penarikan Pegawai 40) Ijazah/Sertifikat 41) SK Pengangkatan pada Jabatan Di luar Instansi Induk 42) Surat Pertimbangan Status PNS 43) SK Pengaktifan Kembali Sebagai PNS 44) Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena Dicalonkan Sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah 45) SK Pensiun 1 Berkas Perseorangan Pejabat Negara Menteri Agama Republik Indonesia m Berkas Perseorangan Pejabat Lainnya Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia			
		1 tahun setelah berhenti dari jabatan	2 tahun setelah hak dan kewajibannya habis	Permanen
		1 tahun setelah berhenti dari jabatan	-	Permanen

B. BIDANG ...

B. BIDANG SUBSTANTIF

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
1	PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN			
	a Program Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran	5 tahun	5 tahun	Musnah
	b Perumusan Kurikulum (GBPP)	1 tahun	1 tahun	Permanen
	c Pengembangan/Penyempurnaan Kurikulum	1 tahun	2 tahun	Permanen
	d Beasiswa Dalam Negeri/Luar Negeri	1 tahun	3 tahun	Musnah
	e Bantuan Tenaga Edukatif Luar Negeri	1 tahun	3 tahun	Musnah
	f Bantuan Sarana Edukatif Luar Negeri	1 tahun	3 tahun	Permanen
	g Bantuan Sarana kepada Lembaga Pendidikan Agama Swasta	1 tahun	3 tahun	Musnah
	h Pengadaan Sarana Pendidikan	1 tahun	2 tahun	Musnah
	i Penerimaan Siswa/Mahasiswa	1 tahun	2 tahun	Musnah
	j Absensi/presensi/daftar hadir	1 tahun	Selama diperlukan	Musnah/ dinilai kembali
	k Evaluasi Hasil Belajar yg Dibuat Sendiri	1 tahun	1 tahun	Musnah
	l Ujian Negara	1 tahun	3 tahun	Musnah
	m Kegiatan Siswa/Mahasiswa/KKN/PKN/PSG	1 tahun	3 tahun	Musnah
	n Daftar Nilai	10 tahun	Selama diperlukan	Musnah
	o Buku Induk Siswa/Mahasiswa	10 tahun	-	Permanen
	p Subsidi Pendidikan	1 tahun	1 tahun	Musnah
	q Supervisi Proses Pendidikan	1 tahun	1 tahun	Musnah
	r Akreditasi/Status	1 tahun	1 tahun	Permanen
	s Pembinaan Organisasi Kesiswaan/Kemahasiswaan	1 tahun	1 tahun	Musnah
	t Administrasi Sumbangan Sekolah (SPP/DPP)	1 tahun	1 tahun	Musnah
	u Relokasi/Filiasiasi	1 tahun	1 tahun	Permanen
	v Kegiatan Ekstra Kurikuler	1 tahun	-	Musnah
	w Pengakuan/Ijazah dari Luar Negeri	1 tahun	1 tahun	Permanen
	x Rekomendasi Izin Belajar Luar Negeri	2 tahun	3 tahun	Musnah
	y Proposal bantuan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	z Pendirian perguruan tinggi	1 tahun	2 tahun	Permanen
	aa Kasus - kasus perguruan tinggi	1 tahun	2 tahun	Selama diperlukan
	bb Izin alih status sekolah dan perguruan tinggi	1 tahun	2 tahun	Permanen
	cc Berkas tunjangan sertifikasi guru/dosen	1 tahun	1 tahun	musnah
	dd Pengabdian Masyarakat	1 tahun	2 tahun	Musnah

2. BIMAS ...

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
3	BIMAS KRISTEN a Kasus Rumah Ibadah b Pembinaan Lembaga Keagamaan c Bantuan Gereja (Alkitab, Baju Toga, Rehap Gedung Gereja, dll) d Kasus Rohaniawan/Penyalahgunaan Wewenang e Peringatan Hari Besar Kristen 1) Natal 2) Jumat Agung f Bimbingan dan Penyuluhan kegiatan agama Kristen g Pesparawi h Pendirian rumah ibadah i Izin tinggal Rohaniawan (KITAS/VITAS) j Laporan organisasi gereja k Hak milik atas tanah	2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	3 tahun 5 tahun 5 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 3 tahun 2 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah Dinilai Kembali Permanen Musnah Musnah Permanen
4	BIMAS KATOLIK a Bantuan perijinan 1) Izin kerja 2) Visa kunjungan 3) KITAS (izin tinggal terbatas) 4) Rekomendasi bebas bea masuk b Bantuan rumah ibadah c Bantuan organisasi katolik d Pengembangan keagamaan 1) Statistik keagamaan 2) Data gereja 3) Pemeluk agama e Penyuluhan dan tenaga teknis keagamaan 1) Data penyuluh agama 2) Data Jupen 3) Juklak, Juknis, Materi Penyuluhan 4) Bantuan Operasional Jupen	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 2 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun selama berlaku 1 tahun	2 tahun 2 tahun 2 tahun 1 tahun 3 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 4 tahun 2 tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Dinilai Kembali Musnah Permanen Dinilai Kembali Musnah Dinilai Kembali Dinilai Kembali selama berlaku Musnah

5. BIMAS ...

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
5	BIMAS HINDU			
	a Penyuluhan			
	1) Perayaan Hari Raya Agama Hindu	1 tahun	1 tahun	Musnah
	2) Utsawa Dharma Gita	1 tahun	3 tahun	Musnah
	3) Seni Budaya Hindu	1 tahun	1 tahun	Musnah
	4) Pewintenan, Diksa/Dwijati	1 tahun	1 tahun	Musnah
	5) Tirta Yatra	1 tahun	1 tahun	Musnah
	6) Juru Penerang Agama Hindu	1 tahun	2 tahun	Musnah
	7) Penyuluh Agama Hindu	1 tahun	3 tahun	Musnah
	8) Dharma Duta	1 tahun	1 tahun	Musnah
	b Pembinaan Lembaga Keagamaan			
	1) Kasus lembaga keagamaan (rumah ibadah)	1 tahun	5 tahun	Permanen
	2) PHDI	1 tahun	3 tahun	Permanen
	3) Banjar/Suka duka Hindu Dharma	1 tahun	3 tahun	Musnah
	4) Pesantian - Pesantian	1 tahun	1 tahun	Musnah
	5) Pengurus Pura	1 tahun	5 tahun	Permanen
	6) Pengurus WHDI	1 tahun	5 tahun	Musnah
	7) Pengurus Peradah	1 tahun	5 tahun	Musnah
	8) Pasraman	1 tahun	3 tahun	Permanen
	c Bimbingan Ibadah			
	1) Persembayangan	1 tahun	1 tahun	Musnah
	2) Upacara keagamaan	1 tahun	1 tahun	Musnah (kecuali Upacara eka Dasa Rudra)
	3) Pembinaan aliran/Keagamaan	1 tahun	3 tahun	Permanen
	d Bimbingan Ibadah Sosial			
	1) Dana Punia	1 tahun	1 tahun	Musnah
	2) Dharma Dana	1 tahun	1 tahun	Musnah
	3) Pembakaran Jenazah	1 tahun	1 tahun	Musnah
	4) Rumah Duka	1 tahun	3 tahun	Musnah
	e Data Pengembangan Keagamaan			
	1) Statistik Keagamaan	1 tahun	3 tahun	Permanen
	2) Pemeluk Agama	1 tahun	3 tahun	Musnah
	3) Tokoh Agama	1 tahun	3 tahun	Musnah
	4) Pura/Candi dan Kuil	1 tahun	3 tahun	Musnah
	f Fasilitas Rohaniawan			
	1) Urusan Perizinan	1 tahun	3 tahun	Musnah
	2) Paskim	1 tahun	1 tahun	Musnah
	3) Visa, RPTK, Fiskal	1 tahun	1 tahun	Musnah
	4) Perpanjangan Izin	1 tahun	1 tahun	Musnah
	5) Pendeta Hindu	1 tahun	2 tahun	Musnah
	6) Pemangku	1 tahun	1 tahun	Musnah
	7) pengambilan sumpah	1 tahun	1 tahun	Musnah
	g Penyuluhan Perkawinan			
	1) Konsultasi Pranikah Agama Hindu	1 tahun	3 tahun	Musnah
	2) Sudhi Wadani	1 tahun	3 tahun	Permanen
	3) Penyuluhan Pasca Nikah	1 tahun	3 tahun	Musnah
	4) Konsultasi Perkawinan			
	a) Perkawinan Agama Hindu	1 tahun	3 tahun	Permanen
	b) Perkawinan Campuran	1 tahun	3 tahun	Permanen
	Surat-Surat yang Berkenaan dengan Seluruh Proses Perkawinan Campuran dengan Agama Hindu			

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
6	BIMAS BUDHA			
	a kasus Rumah Ibadah/Yayasan	1 tahun setelah selesai	5 tahun	permanen
	b Kasus Majelis - Majelis (Keagamaan)	1 tahun setelah selesai	5 tahun	Dinilai kembali
	c Laporan Kegiatan Dhamma Padha Atta Khata Tk. Nasional	1 tahun setelah diedit	5 tahun	Musnah
	d Laporan Kegiatan Siipa Dhamma Sammajja	1 tahun setelah diedit	5 tahun	Musnah
	e Daftar Organisasi Keagamaan	1 tahun setelah didaftar	5 tahun setelah diperbaharui	Musnah
	f Daftar Yayasan/Lembaga Keagamaan	1 tahun setelah didaftar	5 tahun setelah diperbaharui	Musnah
	g Daftar Yayasan/Lembaga Keagamaan	1 tahun setelah didaftar	5 tahun setelah diperbaharui	Musnah
	h Pendirian rumah ibadah	2 tahun	3 tahun	Permanen
	i Pendirian majelis keagamaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	j Hak milik atas tanah	2 tahun	3 tahun	Permanen
7	KERUKUNAN UMAT BERAGAMA			
	a Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama	1 tahun	2 tahun	Permanen
	b Kasus Keagamaan	1 tahun	1 tahun	Permanen
	c Kasus aliran keagamaan (Konghucu)	1 tahun	5 tahun	Permanen

